

# **THE POLITICAL PARTICIPATION OF CHINESE ETHNICS IN LUBUK BAJA DISTRICT IN MAYOR ELECTION OF BATAM CITY IN 2015**

**By: Arini Ameswari**

ariniameswari20@yahoo.com

Supervisor : Mita Rosaliza S.Sos, M.Soc.Sc

mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam

Pekanbaru-Riau

## **ABSTRACT**

The difficult time that happened during New Order for Chinese ethnics in political world caused their political participation is classified low this time so they choose to involve economically. By the end of the New Order, little by little the discrimination that they have felt finally started to be distinguished with the appearance of policies to stop the usage of terms such as Pribumi (indigenous) and Non-Pribumi (non-indigenous) to every aspect, including politic. It started to change Chinese ethnics' attitude towards political activities. This research was conducted in Lubuk Baja District, Batam City. The purpose of this research is to describe political participation of Chinese ethnics in Mayor Election of Batam City in 2015, using rational choice theory. The researcher uses descriptive qualitative method with data collection technique by interviewing and documenting. Purposive sampling is used as sampling technique with the subject of the research includes key informants and 5 informants from Chinese ethnics. The result of this research shows that citizens with Chinese ethnicity in Lubuk Baja District, Batam City are still classified as a non-rational choicer for political participation even though politics around Chinese ethnics have developed this time. Other than that, there are internal and external factors that influenced them to participate in politic. Those internal factors are the less care of the citizens to participate in politic, they do not like to intervene other people's business and thought that politic is hassling. Meanwhile the external is the environment around them, such as their housing.

***Keywords: Political participation, Chinese ethnics, Mayor election, Lubuk Baja district***

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KECAMATAN LUBUK BAJA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA KOTA BATAM TAHUN 2015**

**By: Arini Ameswari**

ariniameswari20@yahoo.com

Dosen Pembimbing : Mita Rosaliza, S.Sos, M.Soc.Sc

mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam

Pekanbaru-Riau

## **ABSTRAK**

Terjadinya masa sulit ketika Orde Baru yang dialami oleh etnis Tionghoa dalam dunia politik menjadikan partisipasi politik mereka tergolong rendah pada saat ini sehingga mereka lebih memilih ke bidang ekonomi. Dengan berakhirnya masa Orde Baru, sedikit demi sedikit diskriminasi yang dirasakan masyarakat etnis Tionghoa mulai dihapuskan dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang berisi dihentikannya penggunaan istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam semua urusan, termasuk bidang politik. Hal itu membuat sikap etnis Tionghoa mulai berubah terhadap kegiatan politik. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 dengan menggunakan teori pilihan rasional. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, Teknik penentuan sampel secara *purposive sampling* dengan subjek penelitian terdiri dari Key Informan dan 5 informan dari masyarakat etnis Tionghoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam masih tergolong bukan pemilih yang rasional dalam berpartisipasi politik walaupun politik etnis Tionghoa sudah berkembang pada saat ini. Selain itu, faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat etnis Tionghoa dalam berpartisipasi politik. Adapun faktor internalnya yaitu kurang pedulinya masyarakat dalam kegiatan politik, mereka tidak suka mencampuri urusan orang dan mereka menganggap politik hal yang merepotkan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah lingkungan tempat tinggal.

**Kata Kunci: Partisipasi politik, etnis Tionghoa, Pemilihan Walikota, Kecamatan Lubuk Baja**

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Pengertian partisipasi politik secara konseptual adalah merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tindakan seperti memberikan suara dalam suatu pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Masyarakat dari semua lapisan, baik itu berdasarkan gender, agama, suku dan sebagainya, mendapatkan hak yang sama dalam berpartisipasi politik. Salah satu suku/etnis yang menjadi kajian yang menarik dalam dunia politik adalah Tionghoa. Etnis Tionghoa di Indonesia masuk dalam daftar 20 terbesar penduduk Indonesia. Jumlah warga keturunan Tionghoa di Indonesia mencapai 2,83 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 236,73 juta jiwa.<sup>2</sup>

Keterlibatan etnis Tionghoa Indonesia di ajang politik bukan merupakan fenomena atau hal yang baru, tetapi bagaimana hal ini bangkit atau jatuh tergantung pada kebijakan masing-

masing rezim terhadap etnis Tionghoa. Sejarah Indonesia juga mencatat partisipasi dan peran aktif warga Tionghoa dalam dinamika sosial, politik, dan kultural di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam.

Dalam dunia politik, etnis Tionghoa di Kota Batam mulai menunjukkan geliat untuk aktif berpolitik. Pemilu legislatif pada April 2009, terdapat empat orang yang berasal dari etnis Tionghoa yang berhasil menduduki bangku DPRD Kota Batam periode tahun 2009-2014 yaitu Asmin Patros dari Partai Golkar, Eddy C. Lummawie dari Partai PKPI, Mawardi Harni dari Partai PAN dan Yohanes dari Partai PPIB. Dan pemilu legislatif pada April 2014, terdapat dua orang yang berasal dari etnis Tionghoa yang berhasil menduduki bangku DPRD Kota Batam periode tahun 2014-2019 yaitu Lik Khai dari Partai Nasdem dan Hendra Asman dari Partai Golkar.

Gambaran ini menunjukkan bahwa pemilu telah menghantarkan wakil orang Tionghoa ke bangku DPRD meskipun terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Terlihat jelas bahwa kehidupan politik etnis Tionghoa di Batam masih tergolong rendah untuk terjun ke bidang politik secara langsung. Dan sebagian etnis Tionghoa hanya berpartisipasi dalam memberikan hak suara pada pemilu.

Pada Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015, terdapat sebanyak 1.638 TPS yang tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih

---

<sup>1</sup> A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 285.

<sup>2</sup> Sumber data dari *Badan Pusat Statistik* tahun 2010.

Tetap) sebanyak 631.038. Dari hasil rekapitulasi akhir penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2015, diperoleh suara sebanyak 185.845 (60,40%) untuk pasangan H. Muhammad Rudi-Amsakar Achmad dan 121.836 (39,60%) untuk pasangan H. Ria Saptarika-H. Sulistyana. Adapun jumlah suara sah seluruh pasangan adalah 308.108 (96,57%) dan suara tidak sah sebanyak 4.214 (3,43%).<sup>3</sup> Berdasarkan hasil penghitungan suara menurut partisipasi pemilih, Lubuk Baja merupakan kecamatan yang terendah diantara semua kecamatan yang ada di kota Batam yaitu sebesar 40,01%. Sedangkan untuk presentase golput, Lubuk Baja termasuk 3 terbanyak sebesar 59,99% lalu diikuti oleh kecamatan Batu aji sebesar 56,19% dan kecamatan Batu Ampar sebesar 53,99%.<sup>4</sup>

Dari beberapa uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Lubuk Baja.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa di kecamatan Lubuk Baja dalam Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015?

2. Apakah alasan-alasan masyarakat etnis Tionghoa di kecamatan Lubuk Baja berpartisipasi politik dalam Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Lubuk Baja dalam Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015.
2. Menguraikan alasan-alasan masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Lubuk Baja berpartisipasi politik dalam Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015.

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemahaman, serta sumbangan bagi mahasiswa sehingga bisa menambah wawasan ilmiah. Selain itu, juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang partisipasi politik etnis Tionghoa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam membuat karya tulis ilmiah. Selain itu,

---

<sup>3</sup> Sumber data dari *Komisi Pemilihan Umum Kota Batam*.

<sup>4</sup> Sumber data dari *Buku Data dan Infografik Pilwako 2015*.

penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang partisipasi politik etnis Tionghoa.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat dan semua pihak akan pentingnya memahami keberagaman etnis.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik pada definisi umum merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam suatu pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dalam buku “*The Comparative Study of Politics*,” David F. Roth dan Frank L. Wilson membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Dengan membagi jenis

partisipasi ini berdasarkan frekuensi dan identitasnya.<sup>6</sup>

#### 1. Aktivis

Pada dasarnya tingkat partisipasi politik pada kategori aktivis seperti para pejabat politik serta pimpinan partai politik atau kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik.

#### 2. Partisipan

Partisipasi politik pada kategori ini adalah seperti menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai politik, kelompok kepentingan, serta aktif dalam proyek-proyek sosial.

#### 3. Pengamat

Partisipasi politik pada tingkat kategori pengamat seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, dan mengikuti perkembangan politik melalui media massa.

#### 4. Apolitis

Apolitis adalah kelompok warga negara yang sama sekali tidak terlibat dalam melakukan kegiatan politik. Mereka yang termasuk dalam kategori ini cenderung tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik.

### **Teori Pilihan Rasional**

Teori ini memandang bahwa individu pemilih sebagai seseorang

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 367.

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 373.

secara sukarela atau bebas menentukan pilihannya berdasar pertimbangan yang menguntungkan dirinya, mereka hanya akan memilih jika memperoleh keuntungan dari pemilihan tersebut, sebaliknya apabila tidak memperoleh keuntungan maka pemilih cenderung tidak menggunakan hak suaranya.<sup>7</sup>

Perspektif pilihan rasional (*Rational Choice*) mengasumsikan bahwa pemilih berperilaku rasional layaknya menerapkan hukum ekonomi, yakni menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Bila dikaitkan dengan politik, pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai produk yang diperimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.<sup>8</sup>

Anthony Downs menjelaskan mengenai *homo economics*, yaitu bahwa sang pemilih rasional hanya menuruti

kepentingannya sendiri. Kalaupun tidak, akan mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan orang lain. Disebut juga dengan *self-interest axiom*<sup>9</sup>.

Jika hal ini diterapkan kepada perilaku pemilih, maka ini berarti bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep politis sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yang dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintah dibandingkan dengan partai lain.<sup>10</sup>

### **Etnis Tionghoa**

Status Tionghoa peranakan sebagai sebuah minoritas di Indonesia berbeda dengan status minoritas di negara-negara lain. Tionghoa peranakan di Indonesia sebagian besar berbicara bahasa Indonesia ketimbang Tionghoa.<sup>11</sup>

Orang-orang Cina yang datang ke Indonesia membawa tradisi, norma-norma, dan sikap fanatisme terhadap tradisi leluhur. Pemikiran mereka dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang berisi pandangan hidup dan filsafat orang-orang Cina seperti Budhisme, Taoisme dan Khong Hu Cu.<sup>12</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 146.

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 146.

<sup>9</sup> Anthony Downs, *Okonomische Theorie der Demokratie*, engl.: *An Economic Theory of Democracy 1952*, (New York: Tubingen, 1968), hlm. 26.

<sup>10</sup> Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber Teori-Teori, Instrumen dan Metode*, Dodi Ambardi, ed., (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung dan LSI, 2009), hlm. 48.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

<sup>12</sup> Siswono Husodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, (Jakarta, Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri, 1985), hlm. 58.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau hal-hal yang khusus dalam masyarakat. Penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran yang cermat dan lengkap tentang obyek yang diteliti.<sup>13</sup> Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri.<sup>14</sup>

### **Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Alasan peneliti memilih Kecamatan Lubuk Baja sebagai lokasi penelitian adalah dikarenakan Kecamatan Lubuk Baja memiliki jumlah penduduk etnis Tionghoa yang terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya.

### **Subyek Penelitian**

Pemilihan subyek atau informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian<sup>15</sup>, dimana informan yang dianggap mengetahui terkait partisipasi politik etnis Tionghoa dan bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja.

---

<sup>13</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 26.

### **Jenis Data**

1. Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan). Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Data primer pada penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan Key Informan dan subjek penelitian yang merupakan etnis Tionghoa yang berada di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data atau informasi dari buku-buku dan jurnal yang diperoleh dari perpustakaan. Selain itu, data juga diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait yaitu:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
  - b. Kantor Camat Lubuk Baja Kota Batam
  - c. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

<sup>14</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiafy Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 78.

<sup>15</sup> Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), hlm. 244-245

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung dari informan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, kemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015**

Pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia, termasuk di Kota Batam. Terdapat dua pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Batam, yaitu pasangan pertama adalah H. Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad

dengan Parpol pengusul Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKP Indonesia dan pasangan kedua adalah H. Ria Saptarika dan H. Sulistyana dengan Parpol pengusul Partai PDI Perjuangan dan PAN.

Pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 sukses dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Meskipun pelaksanaan terbilang sukses, masih terdapat masalah yang muncul yaitu pada penetapan daftar pemilih dan proses penghitungan suara. Seperti yang dikatakan Bapak Agus Setiawan, adanya demonstrasi yang terjadi di KPU Kota Batam. Demonstrasi tersebut merupakan suatu bentuk ketidaksetujuan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak KPU Kota Batam.

Untuk mensukseskan suatu pemilihan, termasuk Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015, terdapat beberapa faktor pendukung yang salah satunya adalah sosialisasi. Pihak KPU Kota Batam telah menjalankan salah satu tugasnya dengan baik. Dapat dilihat dengan dibentuknya Rumah Pintar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa suatu pemilihan umum (Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015) itu penting. Adanya Rumah Pintar ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu pemilihan umum. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat bertambah setiap tahunnya.

Selain sosialisasi, antusiasme masyarakat juga merupakan salah satu

---

<sup>16</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 226.

faktor pendukung dalam mensukseskan suatu pemilu. Antusiasme masyarakat di Kota Batam pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 tergolong rendah dilihat dari partisipasi pemilihnya. Rendahnya partisipasi pemilih dikarenakan masyarakat merasa bosan dengan pemilu karena rentang waktu antara pelaksanaan Pemilihan Legislatif yang dilaksanakan tanggal 9 April 2014 serta Pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli tahun 2014 dengan Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang cukup dekat sehingga partisipasi pemilih pada Pilkada hanya sebesar 52,01%. Terlepas dari rendahnya partisipasi pemilih, pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Batam tahun 2015 berjalan dengan lancar.

### **Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa**

Pada saat ini politik etnis Tionghoa sudah lebih berkembang di Indonesia, terutama di Kota Batam. Keikutsertaan mereka dalam dunia politik menandakan bahwa sudah maju dan berkembangnya politik etnis Tionghoa pada saat ini, khususnya di Kota Batam meskipun hanya dua orang yang menduduki kursi legislatif di tingkat kota. Selain itu, keberadaan mereka dalam sistem pemerintahan juga mewakili etnis Tionghoa dalam bidang politik. Dengan adanya golongan etnis Tionghoa di sistem pemerintahan, mereka dapat ikut memberikan gagasan atau ide di dalam

pembuatan atau perubahan suatu kebijakan atau peraturan di Kota Batam.

Berkembangnya politik etnis Tionghoa pada saat ini tidak terlepas dari sikap pemerintah dalam menyuarakan kepentingan politik etnis Tionghoa. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) responden, terlihat jelas bahwa pemerintah sudah mampu menyuarakan kepentingan politik etnis Tionghoa, salah satunya adalah perayaan Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Pada masa Orde Baru yang dibawah pemerintahan Soeharto, perayaan Imlek dilarang keras untuk dirayakan. Pada masa itu golongan etnis Tionghoa merasa didiskriminasikan dan juga adanya kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan pemerintah untuk golongan etnis Tionghoa. Diskriminasi perlahan-lahan dihilangkan dan kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan dihapuskan pada masa Gus Dur. Dan pada masa itu, perayaan Imlek diperbolehkan dan dijadikan hari libur nasional di Indonesia hingga saat ini.

Sedangkan Bapak Hendra Asman dan Bapak Lik Khai melihat sikap pemerintah dalam menyuarakan kepentingan politik etnis Tionghoa dengan melihat contoh kasus Ahok yaitu penistaan agama. Bila dianalisis secara sederhana, akar permasalahan pada kasus tersebut adalah membawa agama bukan etnis tertentu. Tetapi karena Ahok berasal dari etnis Tionghoa, secara tidak langsung etnis juga ikut terbawa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendra Asman dan Bapak Lik Khai yang mengatakan bahwa

masyarakat akan tetap memandangkan dari etnis Tionghoa meskipun hasil kerja bagus dan berhasil, sama halnya dengan Ahok.

Secara keseluruhan sikap pemerintah sudah menyuarkan kepentingan politik etnis Tionghoa, tetapi jika dilihat lagi pada kasus Ahok maka dapat dikatakan bahwa pemerintah masih setengah berpihak kepada golongan etnis Tionghoa.

### **Pilihan Rasional Dalam Berpartisipasi Politik**

Sebenarnya baik sebagai pemilih atau sebagai kandidat dalam pemilihan, mereka akan sama-sama memikirkan keuntungan bagi mereka sendiri. Bedanya adalah jika sebagai pemilih, akan memilih kandidat yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Pemilih tidak terlalu tertarik kepada konsep visi dan misi kandidat, melainkan kepada keuntungan terbesar yang akan dia peroleh jika kandidat ini terpilih dalam pemilihan. Dan sebagai kandidat, akan memikirkan apakah mencalonkan diri sebagai kandidat membawa keuntungan atau kerugian. Jika seseorang berpikir bahwa menjadi kandidat menguntungkan baginya, maka ia akan tetap terus berjuang. Dan sebaliknya, jika seseorang berpikir akan merugikan dirinya jika menjadi kandidat dalam suatu pemilihan, maka ia akan berhenti.

Pada pilihan rasional berpartisipasi politik sebagai sang pemilih, Bapak Hendra Asman dan Bapak Lik Khai merupakan anggota DRPD Kota Batam sehingga menjadikan

mereka sebagai orang yang bernaung di partai politik. Sebagai anggota partai politik, mereka diwajibkan dan diharuskan memilih calon pasangan pada Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 sesuai perintah dari masing-masing partai mereka. Sehingga mereka tidak bisa memilih berdasarkan “kacamata” mereka sendiri atau keinginan mereka sendiri. Namun, apabila bukan merupakan anggota partai politik, mereka memiliki jawaban yang berbeda. Bapak Hendra Asman akan tetap ikut memilih sesuai dengan kriteria yang beliau punya. Berbanding terbalik dengan Bapak Lik Khai yang mengatakan apabila beliau bukan anggota partai politik, beliau memilih untuk tidak memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 lalu. Beliau menganggap bahwa keikutsertaan dalam pemilihan tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap dirinya. Beliau merasa ikut atau tidak ikut dalam pemilihan tersebut tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya.

Jawaban dari 3 (tiga) informan lainnya yaitu Ibu Siti, Ibu Viona dan Bapak Aseng, juga memiliki perbedaan. Pada Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015, Ibu Siti ikut memberikan hak suaranya. Beliau menganggap ikut memberikan hak suara dalam pemilihan tersebut merupakan salah satu hak warga negara untuk memilih siapakah yang akan menjadi pemimpin. Berbeda dengan Ibu Viona dan Bapak Aseng yang tidak ikut memberikan hak suaranya pada Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015. Ibu Viona lebih memilih untuk

pergi berlibur bersama keluarganya sedangkan Bapak Aseng belum terdaftar di TPS di daerah rumahnya.

Bila dikaitkan dengan teori pilihan rasional sebagai sang pemilih, mereka telah memikirkan keuntungan dan kerugian yang mereka dapatkan secara rasional. Bapak Hendra Asman dan Ibu Siti menganggap jika mereka ikut memilih dalam Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015, maka mereka sudah menggunakan hak mereka sebagai warga negara dengan ikut memberikan hak suaranya. Terlebih lagi bila calon pasangan yang mereka pilih pada proses penghitungan suara dan berhasil terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam, mereka merasa senang dan puas karena suara mereka diterima. Berbeda dengan Bapak Lik Khai, Ibu Viona dan Bapak Aseng yang menganggap bahwa ikut memberikan hak suara dalam Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka. Meskipun Bapak Lik Khai pada kenyataannya tetap memberikan hak suaranya pada pemilihan tersebut karena beliau merupakan anggota partai politik, tetapi beliau berasumsi tidak akan memberikan hak suaranya pada pemilihan tersebut apabila bukan menjadi anggota partai.

Pada pilihan rasional berpartisipasi politik sebagai calon atau kandidat dalam suatu pemilihan, Bapak Hendra Asman sangat mengetahui bahwa untuk bisa ikut membentuk atau mengajukan usulan suatu peraturan haruslah masuk ke dalam sistem pemerintahan. Sesuai dengan teori

pilihan rasional sebagai calon kandidat dalam suatu pemilihan, individu akan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh apabila terpilih. Bapak Hendra Asman telah mempertimbangkan keuntungan apa yang beliau akan peroleh jika terpilih menjadi anggota DPRD Kota Batam. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari fungsi, tugas dan wewenang dari lembaga DPRD. Dengan demikian, beliau dapat mencapai tujuannya yaitu membangun Kota Batam.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lik Khai, beliau mengatakan bahwa ketika mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2014 tidak menghabiskan uang yang banyak. Tetapi jika uang yang dikeluarkan berjumlah besar, beliau tidak akan ikut mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2014. Dengan demikian beliau sudah mempertimbangkan secara teliti mana yang untung dan mana yang rugi bagi dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) informan di atas, terdapat persamaan jawaban yaitu tidak tertarik pada kegiatan politik. Mereka lebih memilih untuk mengurus usaha yang mereka miliki. Jika dianalisis secara sederhana, yang berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang lebih menguntungkan dibandingkan menjadi wakil rakyat atau pejabat publik bila dilihat dalam segi ekonomi. Sebagai pengusaha atau pedagang tentu mereka mengetahui waktu kapan mereka untung dan kapan mereka mengalami rugi. Sedangkan menjadi sebagai wakil rakyat

atau pejabat publik tidak mengetahui kapan pastinya untung, atau bisa jadi mengalami kerugian. Ketiga informan menganggap bahwa mencalonkan diri menjadi wakil rakyat atau pejabat publik adalah suatu hal yang tidak menguntungkan, terutama dalam segi ekonomi.

### **Alasan Berpartisipasi politik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lik Khai, masyarakat Tionghoa rata-rata cenderung kurang peduli terhadap kegiatan politik. Pada Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 contohnya, beliau mengatakan bahwa ikut atau tidak ikut memberikan hak suara tidak berpengaruh pada masyarakat etnis Tionghoa. Mereka menganggap siapa yang terpilih menjadi gubernur, walikota, atau bupati, kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan.

Alasan lainnya adalah masyarakat etnis Tionghoa tidak suka ikut campur urusan orang lain. Di bidang politik, secara tidak langsung mengurus semua urusan dalam hal apapun terlebih lagi apabila terpilih menjadi seorang pemimpin. Hal itulah yang menjadikan perhatian masyarakat etnis Tionghoa kurang pada kegiatan politik.

Penjelasan diatas merupakan faktor-faktor internal. Selain karena faktor internal, juga terdapat faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri berasal dari luar individu seperti contohnya faktor lingkungan tempat tinggal, masyarakat dan lain sebagainya. Lingkungan tempat tinggal memiliki

pengaruh yang besar dalam membentuk sikap individu. Lingkungan tempat tinggal sendiri merupakan bagian terpenting dan mendasar dari kehidupan manusia, termasuk kehidupan sosial. Sementara definisi sikap merupakan keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitar.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Politik etnis Tionghoa di Kota Batam telah berkembang dengan baik. Pemerintah sudah mampu menyuarakan kepentingan politik etnis Tionghoa meskipun masih belum terlalu memihak. Dalam pilihan rasional dalam berpartisipasi politik sebagai sang pemilih, sebagian dari informan-informan penelitian belum termasuk ke dalam pemilih yang rasional. Mereka memilih untuk tidak ikut dalam Pemilihan Walikota Kota Batam Tahun 2015 karena menganggap ikut atau tidak ikut akan tetap sama saja (tidak memiliki keuntungan). Itu menandakan bahwa mereka bukan pemilih yang rasional. Sedangkan pilihan rasional dalam berpartisipasi politik sebagai calon kandidat, juga belum termasuk ke dalam yang rasional. Mereka menganggap bahwa untuk terjun ke dalam kegiatan politik (mencalonkan diri menjadi wakil rakyat atau pejabat politik) merupakan hal yang tidak menguntungkan, terlebih dari segi ekonomi.

Rendahnya partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari diri individu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Untuk faktor internal terdiri dari:

1. Masyarakat etnis Tionghoa terkenal dengan keahliannya dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan sehingga mereka lebih memilih pada kegiatan ekonomi dibandingkan kegiatan politik.
2. Masyarakat etnis Tionghoa cenderung kurang peduli pada kegiatan politik. Sikap tersebut terjadi karena trauma akibat tindakan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa pada masa rezim Orde Baru.
3. Masyarakat etnis Tionghoa tidak suka ikut campur urusan orang lain. Di bidang politik, secara tidak langsung mengurus semua urusan dalam hal apapun terlebih lagi apabila terpilih menjadi seorang pemimpin.

Untuk faktor eksternal sendiri berasal dari luar individu seperti contohnya faktor lingkungan tempat tinggal, masyarakat dan lain sebagainya. Jika individu tinggal di lingkungan yang rata-rata masyarakatnya cenderung kurang peduli, hal itu dapat memengaruhi sikap individu tersebut. Begitu pula sebaliknya.

#### **Saran**

1. Pihak KPU Kota Batam diharapkan lebih giat dalam mensosialisasikan untuk menyadarkan masyarakat,

khususnya etnis Tionghoa bahwa pemilihan umum itu penting.

2. Masyarakat harus lebih sadar bahwa berpartisipasi dalam pemilihan umum itu penting karena dapat menentukan siapa pemimpin yang akan membangun daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Abdullah, Amin. 2005. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Damsar. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Downs, Anthony. 1968. *Okonomische Theorie der Demokratie, engl.: An Economic Theory of Democracy 1952*. New York: Tubingen.
- Efriza. 2012. *Political Explore "Sebuah Kajian Ilmu Politik"*. Bandung: Alfabeta.
- Husodo, Siswono. 1985. *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.
- I, A Rahman H. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Johnson, D. P.. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Terjemahan Robert M.Z Lawang)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Jusuf, Iskandar. 2008. *Dari Tionghoa Hwe Koan 1990 Sampai Sekolah*

- Terpadu Pahoa*. Jakarta: Sekolah Terpadu.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial “Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ode, M.D. La. 2012. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik “Politik Cina Singkawang dan Pontianak di Era Reformasi 1998-2008”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik dalam Prespektif Fungsional*. Surabaya: SIC.
- Rianse dan Abdi, Usman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-Tujuh*. Jakarta: Kencana.
- Roth, Dieter. 2009. , *Studi Pemilu Empiris: Sumber Teori-Teori, Instrumen dan Metode, Dodi Ambardi, ed.*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung dan LSI.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Strauss, Anselm& Corbin, Juliet. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data (Penerjemah: Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata, Leo. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Syarbaini, Syahrial dkk. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usman, Husaini& Akbar, Purnomo Setiafy. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal:**
- S.P, Rizky Hani. 2009. *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilukada Tahun 2009 (studi kasus Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang)*.
- Yanti. 2017. *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilihan Caon Legislatif 2014 Pada Wilayah Pasar Kelurahan Tanjungpinang Kota*.
- Sumber Dokumen:**
- Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
- Data Kantor Camat Lubuk Baja Kota Batam.
- Buku Data dan Infografik Pilwako 2015
- Buku Evaluasi Tahapan Pilwako 2015